



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ZULHENDRI
2. Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
3. NHK : 70954

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.135.000.000

1. Tanah Seluas 760 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 1.585 m2 di KAB / KOTA KOTA PEKANBARU , Rp. 1.585.000.000
3. Tanah Seluas 204 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 160 m2/118 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 200.000.000

1. MOBIL, HONDA HR-VRUS 1.8SCVT Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 450.589.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 365.411.088

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 5.151.000.088

III. HUTANG Rp. 9.723.440

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 5.141.276.648

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.